RENCANA KERJA
BPKAD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

bpkadjateng @bpkadjtg @bpkadjateng https://bpkad.jatengprov.go.id/

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, September 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Tahun 2024-2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 atau RPD Tahun 2024-2026. Hal tersebut merupakan amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Selain itu seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut RKPD yang didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing OPD Tahun 2024 yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Nomor: 050.23/0000031 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola

keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja daerah. Rencana Kerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana kerja selama 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah TA 2025 adalah penjabaran dari Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 serta mendasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (PP Nomor 42 Tahun 2021) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Renja BPKAD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya lebih operasional dan menjadi salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Selain itu, dalam pelaksanaan Renja BPKAD nantinya pada Tahun berjalan, akan menjadi acuan dalam melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja BPKAD yang akan dilaporkan salam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP).

1.2 Landasan Hukum

GAMBAR1.1

KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

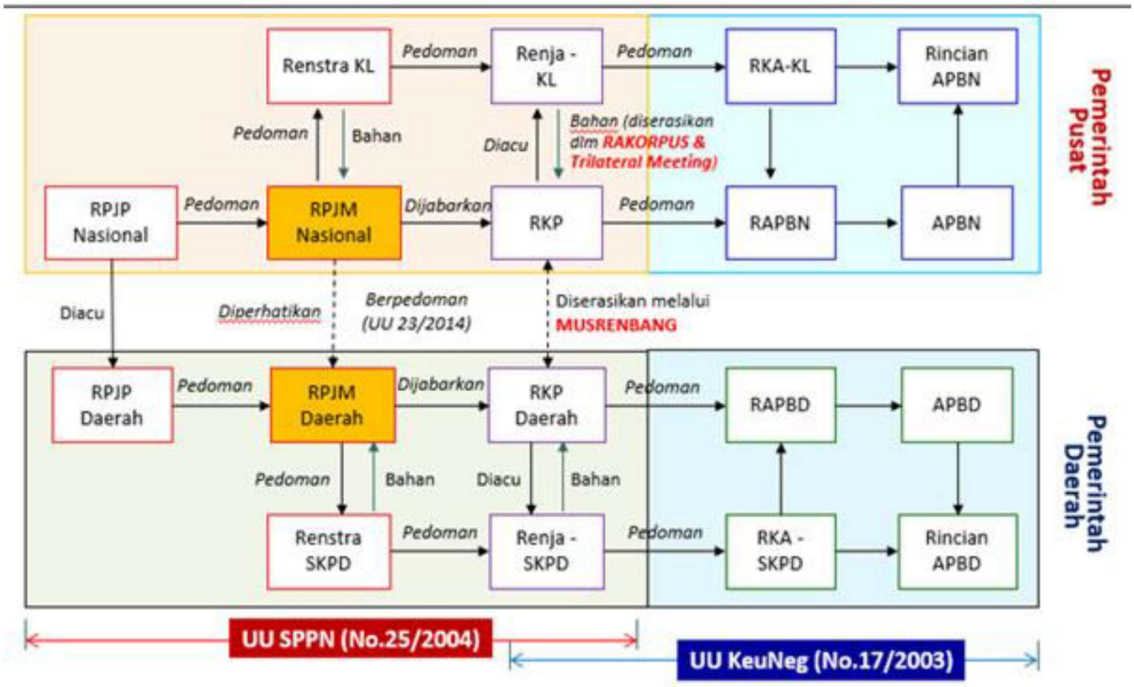

Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
23. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fugsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;

b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program, kegiatandan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
c. Mempermudah pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
d. Menjamin adanya sinergitas, konsistensi, keterkaitan dan keserasian antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan dan penganggaran program, kegitan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang tertib, efekstif, efisien, terukur dan konsisten.
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pencapaian visi misi dan tujuan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
c. Menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan tolok ukur dalam mengukur serta mengevaluasi Kinerja pegawai dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Proses Penyusunan

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2025 dilakukan dengan mendasarkan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2 Tahun sebelumnya, serta dinamika permasalahan yang dihadapi. Dalam menyusun Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya dalam rangka pencapaian sasaran dan target pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sinergitas dan penyelarasan kebijakan penganggaran yang telah ditentukan berdasarkan target kinerja pada RKPD Tahun 2025 harus sinkron dan konsisten dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Renja BPKAD Perangkat Daerah (PD) mengacu pada rumusan kerangka awal RKPD, untuk itu penyusunannya dilakukan secara simultan dan pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan RenjaPD Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra PD, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan, meliputi:
    1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
    2) orientasi mengenai Renja PD;
    3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
    4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
b. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD Tahun berjalan, Ranwal Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
    1) pendahuluan;

2) hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu;
3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
5) penutup.

c. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan;
e. Lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD;
f. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
g. Penetapan.

1.5 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja BPKAD sebagai dokumen perencanaan Tahunan yang didasarkan pada penjabaran rencana pembangunan jangka waktu lima Tahunan. Untuk itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan antaradokumen perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan yang terpadu dan sistematis, sehingga seluruh dokumen-dokumen perencanaan yang disusun haruslah ada keterkaitan satu sama lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD adalah menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD dan susunan garis besar isi dokumen Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat DaerahTahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penalahan UsulanProgram dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif untuk Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Perubahan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Urusan Keuangan										
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	99,05	100	99,05	99,05	NA	NA	NA
		2. Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	NA	NA	NA
		4. Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
		5. Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		6. Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	NA	NA	NA
		7. Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Persentase realisasi serapan APBD	%	95	98,65	95	93,85	98,79	NA	NA	NA
		9. Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	41	41	41	41	100	NA	NA	NA
		1. Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	100
		2. Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	100
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dok	105	104	105	104	99,05	NA	NA	NA
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	105	105	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD	41	41	41	41	100	NA	NA	NA
		1. Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
		2. Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara memadai	OPD	44	44	44	44	100	NA	NA	NA
		2. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	-	3	3	3	100	NA	NA	NA
		3. Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Lap	-	5	5	5	100	NA	NA	NA
		4. Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok	-	1	1	1	100	NA	NA	NA
		5. Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	7	7	7	100	NA	NA	NA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
		7. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
		8. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang diproses Pencairan	OPD	41	41	41	41	100	NA	NA	NA
		Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	100
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dok	1	1	1	1	100	NA	NA	NA
		Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	72,50	77,20	72,50	68	93,79	NA	NA	NA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	NA	NA	NA	NA	NA	84,02	84,02	100
		3. Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
		4. Persentase penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/ Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) tepat waktu	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	Unit	-	60	62	51	82,26	NA	NA	NA
		2. Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dok	-	41	41	41	100	NA	NA	NA
		3. Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik	Dok	-	42	42	42	100	NA	NA	NA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daerah pada Perangkat Daerah									
		4. Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	Dok	-	4	4	4	100	NA	NA	NA
		5. Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit	-	401	233	576	108,07	NA	NA	NA
		6. Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
		7. Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	70,76	70,76	100
		8. Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
		9. Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
	NON URUSAN										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	NA	NA	NA
		2. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	NA	NA	NA
		3. Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	80	80	80	90	112,50	NA	NA	NA
		4. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
		5. Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dok	-	6	10	10	100	NA	NA	NA
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dok	-	7	4	4	100	NA	NA	NA
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dok	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	-	4	1	1	100	NA	NA	NA
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dok	-	6	1	1	100	NA	NA	NA
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok	-	NA	1	1	100	NA	NA	NA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	521	521	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dsusun	Dok / Laporan	-	5	2	2	100	5	5	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dok	-	3	2	2	100	NA	NA	NA
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	1056	1056	100

Berdasarkan tabel 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Indikator kinerja program BPKAD Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan dan Persentase realisasi serapan APBD yang tingkat realisasinya masing-masing adalah 99,05% dan 98,79%. Hal ini disebabkan keterlambatan pengajuan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Demak akibat Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD Kabupaten Demak yang tidak tercapai tepat waktu, sedangkan untuk tidak terserapnya APBD sesuai target karena keterbatasan waktu akibat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di triwulan IV.

   Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 indikator kinerja, terdapat 3 indikator kinerja yang memenuhi target kinerja tahun anggaran 2022 yaitu: Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu; Persentase Penetapan APBD tepat waktu; dan Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu. Demikian pula untuk Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 5 (lima) Kegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu: Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran; Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Keberhasilan tersebut karena program/kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama, komunikasi dan koordinasi antar pihak serta didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang baik.

   Untuk indikator kinerja program yang telah melebihi target adalah

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, terealisasi

sebesar 93,79%, sedangkan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target, yaitu Jumlah Aset yang dimanfaatkan yang terealisasi 82,26%, dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah memenuhi target yaitu: Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun; Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen *updating* data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah; dan 1 (satu) indikator kinerja yang melebihi target yaitu Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah.

Capaian indikator kinerja pada Program dan Kegiatan tersebut dikarenakan adanya barang milik daerah yang dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah pengamanan barang milik daerah melebih target yang direncanakan karena kebutuhan untuk mengamankan barang milik daerah supaya tidak dikuasai oleh Pihak Ketiga.

Faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah inventarisasi, *updating* data barang milik daerah, dan promosi yang dilakukan BPKAD sehingga jumlah barang milik daerah yang berhasil diamankan tercapai dua kali lipat.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Pada indikator kinerja program tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melebihi target yang telah direncanakan, yaitu Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah; dan 2 (dua) indikator kinerja yang memenuhi target yaitu Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dan Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

   Sedangkan 6 (enam) Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi telah memenuhi target.

   Keberhasilan tersebut tercapai karena program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan setiap bulan dan semua dokumen yang ditargetkan telah disusun.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kinerja pada urusan Penunjang bidang Keuangan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/ kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan			100%	NA	99,05%	NA	
2	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu			NA	100%	NA	100%	
3	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu			100%	NA	100%	NA	
4	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu			NA	100%	NA	100%	
5	Persentase Penetapan APBD tepat waktu			100%	100%	100%	100%	
6	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu			100%	100%	100%	100%	
7	Persentase realisasi serapan APBD			95%	NA	98,65%	NA	
8	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas			NA	100%	NA	100%	
9	Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan			62 Unit	NA	60 Unit	NA	

10	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik			NA	84,02%	NA	84,02%	
11	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi			NA	100%	NA	100%	
12	Persentase penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) tepat waktu			NA	100%	NA	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam mewujudkan tercapainya fungsi strategis dimaksud, BPKAD Provinsi Jawa Tengah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan aparatur yang berkompeten, berdedikasi tinggi, dan menjunjung tinggi nilai integritas**.** Disamping hal tersebut, perlu dipersiapkan pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Mengacu pada dokumen Renstra PD, BPKAD melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder.* Dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan jenis pelayanan administrasi keuangan,

antara lain: a) Pelayanan perbendaharaan di bidang pencairan anggaran; b) Pelayanan konsultasi bidang perpajakan, tabungan pensiun (taspen), BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan, dan perbankan; dan c) Pelayanan evaluasi APBD dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di bidang pelayanan administrasi barang milik daerah, BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah memberikan pelayanan pada proses pengamanan BMD melalui sertifikasi, pemagaran, pemberian patok batas dan label serta mekanisme pemindahtanganan dan penghapusan BMD. Selain itu, terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji di Jawa Tengah, BPKAD mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan, khususnya penyediaan tempat (embarkasi) sebagai sarana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan dan BMD tersebut di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berpengaruh terhadap pemahaman SDM, khususnya pelayanan administrasi keuangan yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kurang optimal, antara lain: kurangnya pemahaman pengelola/pengurus BMD dalam menginventarisasi BMD yang berakibat pada data BMD yang tidak komprehensif dan masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD.
3. Peningkatan sarana penunjang penyelenggaraan haji di Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas Gedung penginapan dan fasilitas transit (embarkasi) pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Berkenaan dengan isu dinamika regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut berdampak pada ketidaksesuaian dokumen penganggaran/APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah mengacu pada regulasi terbaru dan pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah serta melaksanakan langkah koordinasi dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada bidang layanan administrasi BMD, dampak yang muncul antara lain: 1) Pemanfaatan BMD yang tidak maksimal; 2) Masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD yang berakibat pada konflik sengketa terhadap pihak lain dan lepasnya penguasaan/kepemilikan BMD; dan 3) Laporan BMD yang tidak valid yang berpotensi terhadap hasil opini/tanggapan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan pengintegrasian sistem informasi;
2. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan;
3. Optimalisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam bidang urusan keuangan Daerah
4. Penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%; dan
5. Pemetaan dan Visualisasi Data Informasi Barang Milik Daerah pada SIM Aset secara komprehensif.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan Keuangan dan Aset Daerah pada 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
3. Adanya dinamika regulasi kebijakan Pemerintah dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong penerapan pelaksanaan kebijakan *paperless* dan *cashless.*

Mengacu pada isu, permasalahan, tantangan, dan peluang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan Langkah-langkah strategis antara lain:

1. Melakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah dan percepatan koordinasi/pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi keuangan dan BMD, termasuk di dalamnya fasilitas penyelenggaraan haji Asrama Donohudan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				**6.868.719.991.000**	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**				**6.868.719.991.000**
A	**Bidang Keuangan**					**Bidang Keuangan**				
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase evaluasi APBD kabupaten / kota tepat waktu	100%	1.127.406.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase evaluasi APBD kabupaten / kota tepat waktu	100%	1.127.406.000
			Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100%	6.798.485.990.000			Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100%	6.798.485.990.000
			Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	10.786.598.000			Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	10.786.598.000
			Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100%	5.586.888.000			Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100%	5.586.888.000
			Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100%	3.437.284.000			Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100%	3.437.284.000
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah	84,02%	7.123.195.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD)	84,02%	7.123.195.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			(BMD) tepat waktu dan berkualitas baik					tepat waktu dan berkualitas baik		
			Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/ rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100%				Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/ rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100%	
			Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100%				Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100%	
B	**NON URUSAN**					**NON URUSAN**				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPKAD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	40.022.630.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	BPKAD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	40.022.630.000
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (AHD)	100%				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (AHD)	100%	
Total Keseluruhan					6.868.719.991.000	Total Keseluruhan				6.868.719.991.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN Keuangan					
	USULAN NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, Kebijakan nasional dan Regulasi yang berlaku saat ini. Pemerintah melalui Rancangan Awal RKP Tahun 2025 telah mengusung tema "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada upaya untuk:

1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sebagai target dan sasaran pembangunan tahun 2025 yang merupakan Indikator Kineja Utama (IKU) Daerah dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

1) PDRB per kapita sebesar 47,96 juta rupiah;
2) Angka Kemiskinan antara 9,28 - 8,08 persen;
3) Rasio Gini sebesar 0,362 persen;
4) Pertumbuhan Ekonomi antara 4,90 - 5,60 persen;
5) Inflasi pada angka 3,0 + 1 persen;
6) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,20 - 4,60 persen;
7) Nilai Tukar Petani 107,52;
8) Indeks Pembangunan Manusia 73,99;
9) Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,91;
10) Indeks Pembangunan Gender 93,13;

11) Indeks Pembangunan Keluarga 58,50;

12) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,56;

13) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana 4%; dan

14) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

Dengan telah ditetapkannya target dan sasaran pembangungan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 akan lebih mengarahkan dalam sisi pengelolaan keuangan daerah untuk dapat melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan barang milik daerah agar dapat dikelola dengan lebih tertib dalam menunjang tugas dan fungsi pada SKPD Pemerintah Jawa Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	76
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,1
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	1,29
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,91

		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93,75
3	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	89,86
		Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100

3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan / Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan / SasaranPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Penetapan APBD terlambat	5	1. Dinamika Regulasi Pusat dan / atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Proses perencanaan terlambat	pembangunan daerah terhambat			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase Realisasi APBD	Belanja tidak terbayar	10	Manajemen kas tidak berjalan dengan baik	program kegiatan pemprov tidak berjalan	Kebijakan SE pengendalian dari TAPD	Kepala BPKAD	2025
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban (LKPD)	5	Dinamika yang menyebabkan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah	Tidak mendapatkan Opini WTP BPK			
Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	aset Pemprov Jateng tidak dapat dimanfaatkan	10	1) Pemprov jateng kalah gugatan di pengadilan 2) Aset dikuasai oleh pihak lain 3) Aset dalam sengketa	pelayanan Pemprov Jateng terganggu	sosialisasi kepemilikan aset, sertifikasi kepemilikan aset	Kepala BPKAD	2025

perundang-undangan								
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Risk register belum dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan	10	pemahaman manajemen risiko pegawai belum memadai	budaya sadar risiko belum dapat terwujud	Bimtek dalam bentuk pelatihan di kantor sendiri (in house training)	Kepala BPKAD	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah	6	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Pelaksanaan aktivitas operasional, tugas dan fungsi perangkat daerah terganggu			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, BPKAD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 3 (tiga) Program, yang meliputi :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan keuangan daerah provinsi, yang meliputi :

   a. Proses atau tahapan penyusunan dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2025, melalui kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

   b. Koordinasi pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk penyusunan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

   c. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada seluruh perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, termasuk didalamnya koordinasi dengan para stakeholder terkait seperti Perbankan, TASPEN, BPJS dan pelaporan pajak di Kantor Pajak. Aktivitas ini dilaksanakan melalui (1) kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan (2) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

   d. Melaksanakan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, meliputi dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan APBD Tahun 2025 dan APBD Induk Tahun 2025. Selain itu termasuk juga aktivitas pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota. Berbagai aktivitas ini ditunjang melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; dan

   e. Penatausahaan dana transfer ke Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berupa Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025. Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025 ini, merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan aset daerah di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya sebagai “Pengelola Barang Milik Daerah”. Adapun aktivitasnya meliputi Perencanaan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengamanan dan Pemberdayaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025 ini, merupakan program yang dilaksanakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Birokrasi baik pada Kantor BPKAD maupun pada Unit Pengelola Asrama Donohudan. Program ini merupakan aktivitas “belanja yang bersifat mengikat” yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan birokrasi selama 12 (dua belas) bulan, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan, langganan listrik, air, internet dan telepon, sarana peralatan dan perlengkapan Gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan Gedung kantor, serta biaya logistik / makan minum pegawai.

Adapun pembiayaan aktivitas tersebut, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, meliputi :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, rencana program dan kegiatan pembangunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam menunjang prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dituangkan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2025			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah													47.625.407.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										%	76		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah											47.118.312.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	81,1	47.118.312.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								47.118.312.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	39.860.980.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan						31.434.373.000		

							Perangkat Daerah								
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	1	31.434.373.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.576.252.000		
										Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	150	29.576.252.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.661.421.000		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1.661.421.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				56.000.000		
										Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	56.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				140.700.000		

										Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	4	140.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.066.707.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	2.066.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		

										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				565.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	565.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				150.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	3	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				300.000.000		
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				601.707.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	601.707.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		

										Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	5	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						95.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Unit	521	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.0005					Pengadaan Mebel				35.000.000		
										Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	60	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		
										Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.664.900.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	4	4.664.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		

										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				650.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.804.900.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	3.804.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.500.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	326	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.000		

										Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	66	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	7.257.332.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						534.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	534.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		

										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				204.500.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	204.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	60.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	170.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.551.454.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	3.551.454.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		

										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.00 02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.170.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1.170.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.00 04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.380.254.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	2.380.254.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.171.378.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	730	3.171.378.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.09.00 02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				132.600.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	132.600.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.00 05					Pemeliharaan Mebel				70.000.000		

										Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	350	70.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.268.778.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	350	1.268.778.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.700.000.000		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	1.700.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah											507.095.000		
			Indeks Manajemen Risiko								Angka	1,29	507.095.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								507.095.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					%	100	507.095.000	SEKRETARIAT	

				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						507.095.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100	507.095.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				256.300.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	256.300.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.795.000		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	250.795.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah													7.314.939.156.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah										%	97,91		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan											7.314.939.156.000		

			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan								%	100	7.307.639.156.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								7.307.639.156.000		
						Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu					%	100	7.297.839.156.000	SEKRETARIAT	
				5.02.02.1.05			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						7.297.839.156.000		
								Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun			Dokumen	1	7.297.839.156.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				5.02.02.1.05.0008					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				3.076.277.924.000		
										Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	1	3.076.277.924.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.05.0009					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.000.000.000		
										Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	25.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.05.0010					Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				4.196.561.232.000		
										Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	Dokumen	1	4.196.561.232.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu					%	100	1.200.000.000	SEKRETARIAT	

				5.02.02.1.02			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					1.200.000.000			
								Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota			Dokumen	105	1.200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				5.02.02.1.02.0002					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
										Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0003					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		
										Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0004					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				218.900.000		

										Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	35	218.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0005					Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				498.400.000		
										Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	498.400.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.0012					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				44.900.000		

										Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	44.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penetapan APBD tepat waktu					%	100	8.600.000.000	Bidang Anggaran	
				5.02.02.1.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						8.600.000.000		
								Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku			Dokumen	8	4.757.137.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				5.02.02.1.01.0001					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				160.000.000		
										Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.01.0007					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4.597.137.000		
										Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Dokumen	2	4.597.137.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku			Dokumen	8	2.884.546.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.01.0002					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				160.000.000		
										Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	2	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.0008					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2.724.546.000		
										Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Dokumen	2	2.724.546.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang			Dokumen	35	958.317.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

								dilakukan Pembinaan.							
				5.02.02.1.01.0009					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				958.317.000		
										Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35	958.317.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun								%	100	4.150.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								4.150.000.000		
						Persentase penyampaian LKPD tepat waktu					%	100	4.150.000.000	Bidang Akuntansi	
				5.02.02.1.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						4.150.000.000		
								Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun			Dokumen	1	1.199.137.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.04.0002					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,				408.927.000		

									Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						
										Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Laporan	1	408.927.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.0011					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				790.210.000		
										Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41	790.210.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun			Dokumen	1	1.066.096.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.04.0008					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				746.868.000		
										Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	746.868.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.0009					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				319.228.000		
										Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	319.228.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

								Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun			Dokumen	1	1.884.767.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
				5.02.02.1.04.0004					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				220.530.000		
										Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	220.530.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.0005					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.664.237.000		
										Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1	1.664.237.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase realisasi APBD								%	93,75	3.150.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								3.150.000.000		

						Persentase penyusunan dokumen manajemen kas					%	100	3.150.000.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				5.02.02.1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						2.200.000.000		
								Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Dokumen	2	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.03.0006					Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				600.000.000		
										Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup			Dokumen	1	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	

								Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra							
				5.02.02.1.03.0003					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				600.000.000		
										Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	600.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun			Dokumen	1	1.000.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
				5.02.02.1.03.0001					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				400.000.000		
										Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	49	400.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.03.0009					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				600.000.000		
										Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49	600.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.06			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						950.000.000		
								Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan			Dokumen	2	950.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
				5.02.02.1.06.0002					Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				950.000.000		
										Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	950.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah													5.365.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)										%	89,86		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan											5.365.000.000		
			Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan								%	100	5.365.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								5.365.000.000		
						Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi					%	100	1.837.000.000	Bidang Aset Daerah	
				5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.837.000.000		
								Meningkatnya jumlah aset yang teramankan			Angka	72,46	1.705.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	

				5.02.03.1.01.0007					Pengamanan Barang Milik Daerah				1.705.000.000		
										Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.705.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -> KOTA SEMARANG
								Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah			%	100	132.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
				5.02.03.1.01.0009					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				132.000.000		
										Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	42	132.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
						Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik					%	89,86	1.180.000.000	Bidang Aset Daerah	
				5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.180.000.000		
								Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu			Dokumen	1	1.180.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
				5.02.03.1.01.0005					Penatausahaan Barang Milik Daerah				352.000.000		

										Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	352.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -> KOTA SEMARANG
				5.02.03.1.01.0006					Inventarisasi Barang Milik Daerah				400.000.000		
										Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	42	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -> KOTA SEMARANG
				5.02.03.1.01.0012					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				428.000.000		
										Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	84	428.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -> KOTA SEMARANG
						Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu					%	100	2.348.000.000	Bidang Aset Daerah	
				5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah						2.348.000.000		
								Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan			%	100	2.348.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

								Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan							
				5.02.03.1.01.0003					Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				698.000.000		
										Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	698.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.03.1.01.0004					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				189.000.000		
										Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	189.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -> KOTA SEMARANG
				5.02.03.1.01.0008					Penilaian Barang Milik Daerah				193.000.000		
										Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	193.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.03.1.01.0010					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1.268.000.000		
										Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	1.268.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -> KOTA SEMARANG
JUMLAH													**7.367.929.563.000**		

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota tidak dapat ditetapkan	8	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	terhambatnya proses pembangunan Pemerintahan Kab/Kota di Jawa Tengah			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi Raperda dan Raperkada kabupaten/kota tidak terbit	8	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota tidak dapat ditetapkan			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	Penyaluran dana transfer tidak tepat waktu	8	1. Memperhitungkan likuiditas/kemampuan keuangan daerah 2. Keterlambatan dalam pengajuan permohonan Dana transfer oleh Kab/Kota/SKPD terkait	1. Manfaat bantuan pemerintah terlambat dirasakan oleh masyarakat 2. Terpengaruhnya likuiditas keuangan Kabupaten/Kota			

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Terdapat kesalahan transfer	6	1. Tidak cermat dalam proses verifikasi 2. Berkas pengajuan pencairan belum lengkap/ sesuai	Pengembalian dan koreksi atas belanja transfer			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD tepat waktu	Tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif	5	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah	Penetapan APBD terlambat			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	APBD disusun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	Pedoman penyusunan APBD belum terbit dari Pusat	Pelaksanaan penyusunan APBD tidak sesuai jadwal			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	ketidak sinkronan pelaksanaan kebijakan anggaran di kab/kota dan PD Provinsi	5	1. Kompetensi SDM yang tidak sesuai 2. Tidak adanya kesepahaman persepsi	Kab/Kota dan PD dianggap tidak patuh kepada kebijakan pusat dan berdampak sanksi sesuai ketentuan			

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	tidak ada perubahan APBD tahun berjalan	5	1. Tidak adanya kesepakatan dan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif 2. Politik dan Kondusivitas Daerah	terjadi inefisiensi program dan kegiatan SKPD			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	Terjadi kesalahan pendefinisian, Pengakuan dan Pengukuran Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	6	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban (LKPD)			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Data laporan keuangan penerimaan yang dihasilkan belum akurat	4	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya rekonsiliasi internal 2. Kurangnya kompetensi SDM keuangan 3. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Data laporan keuangan pengeluaran yang dihasilkan belum akurat	4	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya rekonsiliasi internal 2. Kurangnya kompetensi SDM keuangan 3. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat			

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Kesalahan dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau Kab/Kota 2. perubahan sistem karena terjadi dinamika regulasi pengelolaan keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	dokumen laporan keuangan tidak komprehensif	6	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau Kab/Kota 2. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	terdapat salah saji dokumen laporan keuangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	tidak tersedianya kas	8	1. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai dengan anggaran kas 2. Penerimaan daerah mengalami penurunan	tidak terbayarkan belanja APBD sampai akhir tahun anggaran berkenaan			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Laporan kas daerah tidak akuntabel	12	1. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas antara BUD, SKPD dan lembaga terkait terdapat selisih 2. data pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait tidak akuntabel	tujuan manajemen kas tidak tercapai	Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kepala BPKAD	2025

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	9	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	9	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Perekaman data SIPD tidak sama dengan perekaman pada e-penatausahaan	12	tidak meratanya pemahaman petugas penginput perekaman data aplikasi SIPD	Perekaman Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran di Aplikasi SIPD RI terlambat	melakukan rekonsiliasi secara berkala	Kepala BPKAD	2025
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	Penatausahaan BMD tidak sesuai dengan regulasi	4	1. Dinamika regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2. SKPD tidak tertib administrasi pengelolaan BMD	1. Keterlambatan penyampaian Laporan BMD 2. Kualitas Laporan BMD kurang baik dan berpotensi menjadi temuan pemeriksa			

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	Renja terlambat ditetapkan	9	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terlambat dilaksanakan	penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak tepat waktu			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	Obyek BMD tidak memiliki Kekuatan Hukum yang Pasti /Kuat	5	Pemilik BMD belum melaksanakan pengamanan secara optimal	BMD yang diproses pengamanan menjadi dikuasai pihak lain baik secara fisik dan atau yuridis			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Terdapat sengketa kepemilikan BMD dan penyelesaiannya membutuhkan waktu lama	5	BMD Pengguna dan Pengelola dalam pengelolaannya tidak taat administrasi dan lokasinya tersebar di 35 Kab/Kota	Pengamanan BMD tidak dapat dilakukan secara optimal			

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	tidak tercapainya mufakat atas mediasi	10	para pihak meyakini kebenaran masing-masing atas permasalahan aset	gugatan litigasi/gugatan ke pengadilan	fasilitasi mediasi, negosiasi dan musyawarah senantiasa dilakukan intensif	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah	2025
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	Pemprov Jateng kalah dalam proses persidangan	10	bukti yang dihadirkan oleh Pemprov Jateng dalam persidangan tidak kuat	Kepemilikan BMD beralih	sosialisasi kepemilikan aset, sertifikasi kepemilikan aset	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah	2025
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Laporan BMD tidak valid	4	Kurangnya koordinasi Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran dalam pengumpulan bukti dukung pelaporan BMD	Laporan BMD tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	OPD tidak tertib dalam menyampaikan dokumen RKBMD	4	Kurangnya koordinasi antara Bagian Program dan Pengurus Barang	Keterlambatan penyampaian RKBMD			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Target Retribusi AHD tidak terpenuhi	6	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan AHD yang rendah	Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Provinsi Jawa Tengah tidak dapat memenuhi target			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kelangkaan barang yang dibutuhkan	4	masa pelaksaaan pengadaan barang terlalu singkat	kebutuhan jumlah barang tidak terpenuhi			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	8	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa langganan	Operasional kantor terhambat dan atau berhenti			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	penyedia jasa kebersihan tidak menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam kontrak	8	1) personel kebersihan tidak optimal dalam menjalankan pekerjaan 2) pengawasan atas pekerjaan personel kebersihan tidak optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa AHD yang semakin menurun			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	peralatan dan mesin tidak dapat digunakan	12	1) Terbatasnya kegiatan pemeliharaan peralatan mesin 2) Terbatasnya kegiatan peremajaan peralatan mesin	Tidak optimalnya pelayanan yang diberikan	pengajuan nota dinas kebutuhan pemeliharaan dan/atau peremajaan peralatan dan mesin	Kanit AHD	2025
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	komplain dari pengguna layanan	12	Terbatasnya kegiatan pemeliharaan gedung bangunan	penurunan pendapatan retribusi AHD	pengajuan nota dinas kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan	Kanit AHD	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan	5	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	SDM tidak memahami regulasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	5	Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai dengan dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	pembaharuan data dan informasi tidak dilaksanakan secara cepat dan tepat	4	kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi dengan unit kerja, pengumpulan data dan infromasi bersifat insidentil	Data dan informasi tidak dapat digunakan			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	3	Tidak akuratnya Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pegawai	1. Pengembalian atas kelebihan gaji dan tunjangan 2. Pembuatan susulan gaji dan tunjangan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pegawai tidak mematuhi kode etik pegawai / melanggar peraturan kepegawaian	6	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan pangkat/golongan dan/atau pensiun	2	Personil kepegawaian tidak optimal dalam menjalankan tugasnya	Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan terkait kepegawaian tidak akurat	Pembentukan tim/pejabat pengadaan dan penandatanganan Pakta Integritas	Kepala BPKAD	2025

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Perangkat daerah terlambat menerima informasi-informasi yang dibutuhkan	6	Terbatasnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhambat			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang yang dibutuhkan tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal yang disyaratkan	4	Personil pengadaan belum menguasai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Tidak tercapainya target realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) perangkat daerah			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Gratifikasi dalam proses pengadaan oleh pelaku pengadaan	8	Keinginan memperoleh keuntungan pribadi	Kualitas barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	4	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa langganan	Penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah terganggu			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pegawai tidak merasa nyaman bekerja di kantor	6	Sarana prasarana penunjang operasional perangkat daerah tidak layak	Penyelenggaraan operasional dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah terganggu			

BAB V

PENUTUP

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang teridentifikasi kedalam rencana target kinerja dan pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan tahun 2025. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Menyusun perencanaan secara cermat sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan risiko pengalihan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak;
2. Melaksanakan seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhitungkan secara cermat capaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target kinerja dari program/kegiatan yang telah ditetapkan disertai pendampingan sebagai langkah tindak lanjut atas kinerja yang belum mencapai target.

Dalam rangka mengantisipasi ketidaksesuaian antara rencana dan capaian target kinerja maka perlu ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan apabila terjadi kebijakan *refocusing* anggaran;
2. Melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran sebagai tindak lanjut dinamika regulasi khususnya bidang keuangan dan aset daerah;
3. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman regulasi mengenai keuangan dan aset daerah.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya perbaikan dari segi kualitas perencanaan program/kegiatan, agar dalam implementasinya dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi aparatur, dukungan pendanaan, dan komitmen seluruh elemen pendukung organisasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

		Unit	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
									Uraian	Pihak yang Terkena
			2	3	4	5	6	7	8	9
		Akuntansi	Sasaran OPD	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban (LKPD)	Risiko Strategis	Dinamika yang menyebabkan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah	Tidak mendapatkan Opini WTP BPK	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Anggaran	Sasaran OPD	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Penetapan APBD terlambat	Risiko Strategis	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Proses perencanaan terlambat	pembangunan daerah terhambat	Pemprov Jawa Tengah
		Perbend Kasda	Sasaran OPD	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	Belanja tidak terbayar	Risiko Strategis	Manajemen kas tidak berjalan dengan baik	program kegiatan pemprov tidak berjalan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait
		Aset	Sasaran OPD	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	aset Pemprov Jateng tidak dapat dimanfaatkan	Risiko Strategis	1) Pemprov jateng kalah gugatan di pengadilan 2) Aset dikuasai oleh pihak lain 3) Aset dalam sengketa	pelayanan Pemprov Jateng terganggu	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran OPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Risk register belum dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan	Risiko Strategis	pemahaman manajemen risiko pegawai belum memadai	budaya sadar risiko belum dapat terwujud	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah	Risiko Strategis	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Pelaksanaan aktivitas operasional, tugas dan fungsi perangkat daerah terganggu	BPKAD dan Stake Holder
		Sekretariat	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota tidak dapat ditetapkan	Risiko Operasional	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	terhambatnya proses pembangunan Pemerintahan Kab/Kota di Jawa Tengah	Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi Raperda dan Raperkada kabupaten/kota tidak terbit	Risiko Operasional	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota tidak dapat ditetapkan	Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	Penyaluran dana transfer tidak tepat waktu	Risiko Operasional	1. Memperhitungkan likuiditas/kemampuan keuangan daerah 2. Keterlambatan dalam pengajuan permohonan Dana transfer oleh Kab/Kota/SKPD terkait	1. Manfaat bantuan pemerintah terlambat dirasakan oleh masyarakat 2. Terpengaruhnya likuiditas keuangan Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/ Kab/Kota/ Desa dan Masyarakat
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Terdapat kesalahan transfer	Risiko Operasional	1. Tidak cermat dalam proses verifikasi 2. Berkas pengajuan pencairan belum lengkap/ sesuai	Pengembalian dan koreksi atas belanja transfer	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/ Kab/Kota/ Desa
		Anggaran	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD tepat waktu	Tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif	Risiko Strategis	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah	Penetapan APBD terlambat	Seluruh SKPD dan Masyarakat
		Anggaran	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	APBD disusun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Risiko Strategis	Pedoman penyusunan APBD belum terbit dari Pusat	Pelaksanaan penyusunan APBD tidak sesuai jadwal	Seluruh SKPD dan Masyarakat
		Anggaran	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	ketidak sinkronan pelaksanaan kebijakan anggaran di kab/kota dan PD Provinsi	Risiko Operasional	1. Kompetensi SDM yang tidak sesuai 2. Tidak adanya kesepahaman persepsi	Kab/Kota dan PD dianggap tidak patuh kepada kebijakan pusat dan berdampak sanksi sesuai ketentuan	Seluruh SKPD Pemeritah Kab/Kota dan Masyarakat
		Anggaran	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	tidak ada perubahan APBD tahun berjalan	Risiko Strategis	1. Tidak adanya kesepakatan dan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif 2. Politik dan Kondusivitas Daerah	terjadi inefisiensi program dan kegiatan SKPD	Seluruh SKPD dan Masyarakat
		Akuntansi	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	Terjadi kesalahan pendefinisian, Pengakuan dan Pengukuran Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Risiko Strategis	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban (LKPD)	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Akuntansi	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Data laporan keuangan penerimaan yang dihasilkan belum akurat	Risiko Operasional	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya rekonsiliasi internal 2. Kurangnya kompetensi SDM keuangan 3. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat	Seluruh OPD
		Akuntansi	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Data laporan keuangan pengeluaran yang dihasilkan belum akurat	Risiko Operasional	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya rekonsiliasi internal 2. Kurangnya kompetensi SDM keuangan 3. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat	Seluruh OPD
		Akuntansi	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Kesalahan dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Risiko Operasional	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau Kab/Kota 2. perubahan sistem karena terjadi dinamika regulasi pengelolaan keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Akuntansi	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	dokumen laporan keuangan tidak komprehensif	Risiko Operasional	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau Kab/Kota 2. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	terdapat salah saji dokumen laporan keuangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat	Seluruh OPD
		Perbend Kasda	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	tidak tersedianya kas	Risiko Strategis	1. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai dengan anggaran kas 2. Penerimaan daerah mengalami penurunan	tidak terbayarkan belanja APBD sampai akhir tahun anggaran berkenaan	Seluruh SKPD dan Masyarakat
		Perbend Kasda	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Laporan kas daerah tidak akuntabel	Risiko Operasional	1. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas antara BUD, SKPD dan lembaga terkait terdapat selisih 2. data pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait tidak akuntabel	tujuan manajemen kas tidak tercapai	Seluruh SKPD dan Masyarakat
		Perbend Kasda	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	Risiko Operasional	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pihat terkait
		Perbend Kasda	Sasaran Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	Risiko Operasional	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah	seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait
		Perbend Kasda	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	Perekaman data SIPD tidak sama dengan perekaman pada e-penatausahaan	Risiko Operasional	tidak meratanya pemahaman petugas penginput perekaman data aplikasi SIPD	Perekaman Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran di Aplikasi SIPD RI terlambat	BPKAD dan SKPD
		Aset	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	Penatausahaan BMD tidak sesuai dengan regulasi	Risiko Operasional	1. Dinamika regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2. SKPD tidak tertib administrasi pengelolaan BMD	1. Keterlambatan penyampaian Laporan BMD 2. Kualitas Laporan BMD kurang baik dan berpotensi menjadi temuan pemeriksa	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Aset	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	Renja terlambat ditetapkan	Risiko Operasional	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terlambat dilaksanakan	penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak tepat waktu	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Aset	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	Obyek BMD tidak memiliki Kekuatan Hukum yang Pasti /Kuat	Risiko Operasional	Pemilik BMD belum melaksanakan pengamanan secara optimal	BMD yang diproses pengamanan menjadi dikuasai pihak lain baik secara fisik dan atau yuridis	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Aset	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Terdapat sengketa kepemilikan BMD dan penyelesaiannya membutuhkan waktu lama	Risiko Operasional	BMD Pengguna dan Pengelola dalam pengelolaannya tidak taat administrasi dan lokasinya tersebar di 35 Kab/Kota	Pengamanan BMD tidak dapat dilakukan secara optimal	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Aset	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	tidak tercapainya mufakat atas mediasi	Risiko Kemitraan	para pihak meyakini kebenaran masing-masing atas permasalahan aset	gugatan litigasi/gugatan ke pengadilan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Aset	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	Pemprov Jateng kalah dalam proses persidangan	Risiko Hukum	bukti yang dihadirkan oleh Pemprov Jateng dalam persidangan tidak kuat	Kepemilikan BMD beralih	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Aset	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Laporan BMD tidak valid	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran dalam pengumpulan bukti dukung pelaporan BMD	Laporan BMD tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai /	Skala	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	2	5	10	Ada	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada OPD	Memadai	1	5	5
Penetapan APBD terlambat	3	5	15	Ada	1) koordinasi antara para pihak berkepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan DPRD) 2) TAPD	Memadai	2	5	10
Belanja tidak terbayar	3	5	15	Ada	monitoring kas	Memadai	2	5	10
aset Pemprov Jateng tidak dapat dimanfaatkan	2	5	10	Ada	melakukan Pengamanan fisik, yuridis dan administrasi BMD yang dikuasai Pemerintah	Memadai	2	5	10
tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	2	5	10	Ada	Sosialisasi Pergub manajemen risiko	Memadai	2	5	10
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah	3	3	9	Ada	1. Pembinaan, pengarahan pimpinan kepada pegawai; dan 2. Pelaksanaan pengendalian intern pegawai	Memadai	2	3	6
Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota tidak dapat ditetapkan	3	4	12	Ada	menerbitkan Surat Edaran percepatan tahapan penyusunan APBD Kab/Kota	Memadai	2	4	8
Hasil evaluasi Raperda dan Raperkada kabupaten/kota tidak terbit	3	4	12	Ada	menerbitkan Surat Edaran percepatan tahapan penyusunan APBD Kab/Kota	Memadai	2	4	8
Penyaluran dana transfer tidak tepat waktu	3	4	12	Ada	Koordinasi antar pihak terkait (Bidang Perbendaharaan dan Subbag Keuangan BPKAD Prov Jateng,	Memadai	2	4	8
Terdapat kesalahan transfer	3	3	9	Ada	1. Verifikasi dokumen pengajuan pencairan dana transfer 2. Penggunaan aplikasi/ sistem	Memadai	2	3	6
Tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif	2	5	10	Ada	koordinasi antara para pihak berkepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan DPRD)	Memadai	1	5	5
APBD disusun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	2	5	10	Ada	koordinasi antara para pihak berkepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan DPRD)	Memadai	1	5	5
ketidak sinkronan pelaksanaan kebijakan anggaran di kab/kota dan PD Provinsi	2	5	10	Ada	Koordinasi antara para pihak berkepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi, DPRD, Kab/Kota)	Memadai	1	5	5
tidak ada perubahan APBD tahun berjalan	2	5	10	Ada	koordinasi antara para pihak berkepentingan (Pemerintah Pusat, Provinsi dan DPRD)	Memadai	1	5	5
Terjadi kesalahan pendefinisian, Pengakuan dan Pengukuran Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	3	3	9	Ada	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada OPD	Memadai	2	3	6
Data laporan keuangan penerimaan yang dihasilkan belum akurat	3	3	9	Ada	Melaksanakan Pendampingan Pengelolaan Laporan Keuangan Penerimaan, Rekonsiliasi dan	Memadai	2	2	4
Data laporan keuangan pengeluaran yang dihasilkan belum akurat	3	3	9	Ada	Melaksanakan Pendampingan Pengelolaan Laporan Keuangan Pengeluaran, Rekonsiliasi dan	Memadai	2	2	4
Kesalahan dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	3	9	Ada	1. Melakukan Rekonsiliasi OPD dan/atau Kab/Kota terkait Laporan Keuangan 2.	Memadai	2	2	4
dokumen laporan keuangan tidak komprehensif	3	3	9	Ada	1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah 2) penyusunan Kebijakan dan	Memadai	2	3	6
tidak tersedianya kas	3	4	12	Ada	1. manajemen likuiditas 2. minimalisasi kas yang menganggur 3. mengurangi biaya transaksi	Memadai	2	4	8
Laporan kas daerah tidak akuntabel	4	4	16	Ada	Digitasilasi penatausahaan pengelolaan kas daerah dan mengintegrasikan pembayarannya dengan instansi	Memadai	3	4	12
Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	3	4	12	Ada	Dengan melaksanakan penatausahaan secara digital dan non tunai	Memadai	3	3	9
Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	3	4	12	Ada	Dengan melaksanakan penatausahaan secara digital dan non tunai	Belum Memadai	3	3	9
Perekaman data SIPD tidak sama dengan perekaman pada e-penatausahaan	3	4	12	Ada	Melakukan pelatihan SIPD RI oleh Kemendagri dan pendampingan aplikasi	Memadai	3	4	12
Penatausahaan BMD tidak sesuai dengan regulasi	3	3	9	Ada	1. Melakukan pemutakhiran sistem penatausahaan BMD SIMASET Jateng sesuai regulasi dan	Memadai	2	2	4
Renja terlambat ditetapkan	3	3	9	Ada	membuat jadwal penyusunan dan penyampaian RKBMD sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum Memadai	3	3	9
Obyek BMD tidak memiliki Kekuatan Hukum yang Pasti /Kuat	2	5	10	Ada	melakukan Pengamanan fisik, yuridis dan administrasi BMD yang dikuasai Pemerintah	Memadai	1	5	5
Terdapat sengketa kepemilikan BMD dan penyelesaiannya membutuhkan waktu lama	2	5	10	Ada	Melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum yaitu: pemanfaatan secara langsung/dikuasa	Memadai	1	5	5
tidak tercapainya mufakat atas mediasi	2	5	10	Ada	dilakukan upaya pendekatan / negosiasi secara berulang-ulang namun tetap belum ada kesepakatan	Belum Memadai	2	5	10
Pemprov Jateng kalah dalam proses persidangan	2	5	10	Ada	tim advokasi Pemprov Jateng	Belum Memadai	2	5	10
Laporan BMD tidak valid	3	3	9	Ada	Melakukan pendampingan dan konsolidasi Laporan BMD pada SKPD secara periodik, terjadwal, dan	Memadai	2	2	4

Tabel 3. Daftar Risiko Prioritas

Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	5	Kepala BPKAD	Dinamika yang menyebabkan perubahan sistem pengelolaan keuangan	Tidak mendapatkan Opini WTP BPK
Penetapan APBD terlambat	10	Kepala BPKAD	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas	pembangunan daerah terhambat
Belanja tidak terbayar	10	Pemerintah Daerah	Manajemen kas tidak berjalan dengan baik	program kegiatan pemprov tidak berjalan
aset Pemprov Jateng tidak dapat dimanfaatkan	10	Gubernur Provinsi Jawa Tengah	1) Pemprov jateng kalah gugatan di pengadilan 2) Aset dikuasai oleh pihak lain	pelayanan Pemprov Jateng terganggu
tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	10	Kepala BPKAD	pemahaman manajemen risiko pegawai belum memadai	budaya sadar risiko belum dapat terwujud
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah	6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Pelaksanaan aktivitas operasional, tugas dan fungsi perangkat
Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota tidak dapat ditetapkan	8	Kepala BPKAD	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	terhambatnya proses pembangunan Pemerintahan Kab/Kota di Jawa Tengah
Hasil evaluasi Raperda dan Raperkada kabupaten/kota tidak terbit	8	Kepala BPKAD	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota tidak dapat ditetapkan
Penyaluran dana transfer tidak tepat waktu	8	Kepala BPKAD	1. Memperhitungkan likuiditas/kemampuan keuangan	1. Manfaat bantuan pemerintah terlambat dirasakan oleh masyarakat
Terdapat kesalahan transfer	6	Kepala BPKAD	1. Tidak cermat dalam proses verifikasi 2. Berkas pengajuan pencairan	Pengembalian dan koreksi atas belanja transfer
Tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif	5	Kepala BPKAD	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas	Penetapan APBD terlambat
APBD disusun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	Kepala BPKAD	Pedoman penyusunan APBD belum terbit dari Pusat	Pelaksanaan penyusunan APBD tidak sesuai jadwal
ketidak sinkronan pelaksanaan kebijakan anggaran di kab/kota dan	5	Kepala BPKAD	1. Kompetensi SDM yang tidak sesuai 2. Tidak adanya kesepahaman persepsi	Kab/Kota dan PD dianggap tidak patuh kepada kebijakan pusat dan berdampak
tidak ada perubahan APBD tahun berjalan	5	Kepala BPKAD	1. Tidak adanya kesepakatan dan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif	terjadi inefisiensi program dan kegiatan SKPD
Terjadi kesalahan pendefinisian, Pengakuan dan Pengukuran Aset,	6	Kepala BPKAD	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban (LKPD)
Data laporan keuangan penerimaan yang dihasilkan belum akurat	4	Bidang Akuntansi	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan
Data laporan keuangan pengeluaran yang dihasilkan belum akurat	4	Bidang Akuntansi	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan
Kesalahan dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban	4	Bidang Akuntansi	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan
dokumen laporan keuangan tidak komprehensif	6	Bidang Akuntansi	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau	terdapat salah saji dokumen laporan keuangan sehingga tidak dapat dijadikan
tidak tersedianya kas	8	Kepala BPKAD	1. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai dengan anggaran kas 2. Penerimaan	tidak terbayarkan belanja APBD sampai akhir tahun anggaran berkenaan
Laporan kas daerah tidak akuntabel	12	Kepala BPKAD	1. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas antara BUD,	tujuan manajemen kas tidak tercapai
Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	9	Kepala BPKAD	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah
Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	9	Kepala BPKAD	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah
Perekaman data SIPD tidak sama dengan perekaman pada e-penatausahaan	12	Pemerintah Daerah	tidak meratanya pemahaman petugas penginput perekaman data	Perekaman Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran di Aplikasi SIPD
Penatausahaan BMD tidak sesuai dengan regulasi	4	Kepala BPKAD	1. Dinamika regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2. SKPD tidak	1. Keterlambatan penyampaian Laporan BMD 2. Kualitas Laporan BMD
Renja terlambat ditetapkan	9	Kepala BPKAD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terlambat dilaksanakan	penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak tepat waktu
Obyek BMD tidak memiliki Kekuatan Hukum yang Pasti /Kuat	5	Gubernur Provinsi Jawa Tengah	Pemilik BMD belum melaksanakan pengamanan secara optimal	BMD yang diproses pengamanan menjadi dikuasai pihak lain baik secara
Terdapat sengketa kepemilikan BMD dan penyelesaiannya	5	Kepala BPKAD	BMD Pengguna dan Pengelola dalam pengelolaannya tidak taat administrasi	Pengamanan BMD tidak dapat dilakukan secara optimal
tidak tercapainya mufakat atas mediasi	10	Kepala BPKAD	para pihak meyakini kebenaran masing-masing atas permasalahan	gugatan litigasi/gugatan ke pengadilan
Pemprov Jateng kalah dalam proses persidangan	10	Kepala BPKAD	bukti yang dihadirkan oleh Pemprov Jateng dalam persidangan tidak kuat	Kepemilikan BMD beralih
Laporan BMD tidak valid	4	Kepala BPKAD	Kurangnya koordinasi Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran	Laporan BMD tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Pernyataan	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	5	Dinamika yang menyebabkan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah	Tidak mendapatkan Opini WTP BPK			
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	Penetapan APBD terlambat	10	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah 3. Proses perencanaan terlambat	pembangunan daerah terhambat	Koordinasi intensif Pemprov Jateng dengan berbagai pihak	Kepala BPKAD	2025
Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	Belanja tidak terbayar	10	Manajemen kas tidak berjalan dengan baik	program kegiatan pemprov tidak berjalan	Kebijakan SE pengendalian dari TAPD	Kepala BPKAD	2025
Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	aset Pemprov Jateng tidak dapat dimanfaatkan	10	1) Pemprov jateng kalah gugatan di pengadilan 2) Aset dikuasai oleh pihak lain 3) Aset dalam sengketa	pelayanan Pemprov Jateng terganggu	sosialisasi kepemilikan aset, sertifikasi kepemilikan aset	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah	2025
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Risk register belum dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan	5	1) Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan	Bimtek dalam bentuk pelatihan di kantor sendiri (in house training)	Kepala BPKAD	2025
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah	6	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Pelaksanaan aktivitas operasional, tugas dan fungsi perangkat daerah terganggu			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota tidak dapat ditetapkan	8	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	terhambatnya proses pembangunan Pemerintahan Kab/Kota di Jawa Tengah			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi Raperda dan Raperkada kabupaten/kota tidak terbit	8	dinamika penyusunan perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota	Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota tidak dapat ditetapkan			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	Penyaluran dana transfer tidak tepat waktu	8	1. Memperhitungkan likuiditas/kemampuan keuangan daerah 2. Keterlambatan dalam pengajuan permohonan Dana transfer oleh Kab/Kota/SKPD terkait	1. Manfaat bantuan pemerintah terlambat dirasakan oleh masyarakat 2. Terpengaruhnya likuiditas keuangan Kabupaten/Kota			
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	Terdapat kesalahan transfer	6	1. Tidak cermat dalam proses verifikasi 2. Berkas pengajuan pencairan belum lengkap/ sesuai	Pengembalian dan koreksi atas belanja transfer			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD tepat waktu	Tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif	5	1. Dinamika Regulasi Pusat dan/atau Daerah 2. Politik dan Kondusivitas Daerah	Penetapan APBD terlambat			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	APBD disusun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	Pedoman penyusunan APBD belum terbit dari Pusat	Pelaksanaan penyusunan APBD tidak sesuai jadwal			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi	ketidak sinkronan pelaksanaan kebijakan anggaran di kab/kota dan PD Provinsi	5	1. Kompetensi SDM yang tidak sesuai 2. Tidak adanya kesepahaman persepsi	Kab/Kota dan PD dianggap tidak patuh kepada kebijakan pusat dan berdampak sanksi sesuai ketentuan			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang	tidak ada perubahan APBD tahun berjalan	5	1. Tidak adanya kesepakatan dan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif 2. Politik dan Kondusivitas Daerah	terjadi inefisiensi program dan kegiatan SKPD			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	Terjadi kesalahan pendefinisian, Pengakuan dan Pengukuran Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	6	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	Keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban (LKPD)			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	Data laporan keuangan penerimaan yang dihasilkan belum akurat	4	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya rekonsiliasi internal 2. Kurangnya kompetensi SDM keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	Data laporan keuangan pengeluaran yang dihasilkan belum akurat	4	1. Sistem Pengendalian Intern OPD belum optimal, seperti belum adanya rekonsiliasi internal 2. Kurangnya kompetensi SDM keuangan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	Kesalahan dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau Kab/Kota 2. perubahan sistem karena terjadi dinamika regulasi pengelolaan	Kualitas keputusan yang dihasilkan rendah karena berdasarkan pertimbangan dari data yang kurang akurat			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	dokumen laporan keuangan tidak komprehensif	6	1. informasi belum tersampaikan secara menyeluruh OPD dan/atau Kab/Kota 2. Dinamika regulasi pengelolaan keuangan	terdapat salah saji dokumen laporan keuangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	tidak tersedianya kas	8	1. Realisasi pengajuan SP2D tidak sesuai dengan anggaran kas 2. Penerimaan daerah mengalami penurunan	tidak terbayarkan belanja APBD sampai akhir tahun anggaran berkenaan			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	Laporan kas daerah tidak akuntabel	12	1. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas antara BUD, SKPD dan lembaga terkait terdapat selisih 2. data pemungutan dan pemotongan atas SP2D	tujuan manajemen kas tidak tercapai	Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kepala BPKAD	2025
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	9	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan	Penatausahaan tidak transparan dan akuntabel	9	Pertanggungjawaban transaksi keuangan tidak optimal secara acrual basis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Perekaman data SIPD tidak sama dengan perekaman pada e-penatausahaan	12	tidak meratanya pemahaman petugas penginput perekaman data aplikasi SIPD	Perekaman Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran di Aplikasi SIPD RI terlambat	melakukan rekonsiliasi secara berkala	Kepala BPKAD	2025
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	Penatausahaan BMD tidak sesuai dengan regulasi	4	1. Dinamika regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi 2. SKPD tidak tertib administrasi pengelolaan BMD	1. Keterlambatan penyampaian Laporan BMD 2. Kualitas Laporan BMD kurang baik dan berpotensi menjadi temuan pemeriksa			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencan	Renja terlambat ditetapkan	9	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terlambat dilaksanakan	penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak tepat waktu			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	Obyek BMD tidak memiliki Kekuatan Hukum yang Pasti /Kuat	5	Pemilik BMD belum melaksanakan pengamanan secara optimal	BMD yang diproses pengamanan menjadi dikuasai pihak lain baik secara fisik dan atau yuridis			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	Terdapat sengketa kepemilikan BMD dan penyelesaiannya membutuhkan waktu lama	5	BMD Pengguna dan Pengelola dalam pengelolaannya tidak taat administrasi dan lokasinya tersebar di 35 Kab/Kota	Pengamanan BMD tidak dapat dilakukan secara optimal			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	tidak tercapainya mufakat atas mediasi	10	para pihak meyakini kebenaran masing-masing atas permasalahan aset	gugatan litigasi/gugatan ke pengadilan	fasilitasi mediasi, negosiasi dan musyawarah senantiasa dilakukan intensif	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah	2025
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	Pemprov Jateng kalah dalam proses persidangan	10	bukti yang dihadirkan oleh Pemprov Jateng dalam persidangan tidak kuat	Kepemilikan BMD beralih	sosialisasi kepemilikan aset, sertifikasi kepemilikan aset	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah	2025
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	Laporan BMD tidak valid	4	Kurangnya koordinasi Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran dalam pengumpulan bukti dukung pelaporan BMD	Laporan BMD tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan			

misal: tidak terjadi kesepakatan diluar pengadilan

misal: tidak terjadi kesepakatan diluar pengadilan

		Aset	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	OPD tidak tertib dalam menyampaikan dokumen RKBMD	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara Bagian Program dan Pengurus Barang	Keterlambatan penyampaian RKBMD	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		AHD	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Target Retribusi AHD tidak terpenuhi	Risiko Reputasi	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan AHD yang rendah	Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Provinsi Jawa Tengah tidak dapat memenuhi target	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		AHD	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kelangkaan barang yang dibutuhkan	Risiko Kemitraan	masa pelaksaaan pengadaan barang terlalu singkat	kebutuhan jumlah barang tidak terpenuhi	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		AHD	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	Risiko Operasional	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa langganan	Operasional kantor terhambat dan atau berhenti	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		AHD	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	penyedia jasa kebersihan tidak menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam kontrak	Risiko Operasional	1) personel kebersihan tidak optimal dalam menjalankan pekerjaan 2) pengawasan atas pekerjaan personel kebersihan tidak optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa AHD yang semakin menurun	AHD
		AHD	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	peralatan dan mesin tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	1) Terbatasnya kegiatan pemeliharaan peralatan mesin 2) Terbatasnya kegiatan peremajaan peralatan mesin	Tidak optimalnya pelayanan yang diberikan	BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan pengguna layanan
		AHD	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	komplain dari pengguna layanan	Risiko Reputasi	Terbatasnya kegiatan pemeliharaan gedung bangunan	penurunan pendapatan retribusi AHD	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan	Risiko Strategis	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	SDM tidak memahami regulasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Risiko Operasional	Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai dengan dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	pembaharuan data dan informasi tidak dilaksanakan secara cepat dan tepat	Risiko Operasional	kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi dengan unit kerja, pengumpulan data dan infromasi bersifat insidentil	Data dan informasi tidak dapat digunakan	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Risiko Operasional	Tidak akuratnya Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pegawai	1. Pengembalian atas kelebihan gaji dan tunjangan 2. Pembuatan susulan gaji dan tunjangan	BPKAD Provinsi Jawa Tengah
		Sekretariat	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pegawai tidak mematuhi kode etik pegawai / melanggar peraturan kepegawaian	Risiko Kepatuhan	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah	BPKAD dan Stake Holder
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan pangkat/golongan dan/atau pensiun	Risiko Operasional	Personil kepegawaian tidak optimal dalam menjalankan tuga	Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan terkait kepegawaian tidak akurat	Pegawai, BPKAD dan Stake Holder
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Perangkat daerah terlambat menerima informasi-informasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Terbatasnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhambat	BPKAD dan Stake Holder
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang yang dibutuhkan tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal yang disyaratkan	Risiko Operasional	Personil pengadaan belum menguasai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Tidak tercapainya target realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) perangkat daerah	BPKAD
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Gratifikasi dalam proses pengadaan oleh pelaku pengadaan	Risiko Fraud	Keinginan memperoleh keuntungan pribadi	Kualitas barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	BPKAD
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	Risiko Operasional	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa langganan	Penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah terganggu	BPKAD dan Stake Holder
		Sekretariat	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pegawai tidak merasa nyaman bekerja di kantor	Risiko Operasional	Sarana prasarana penunjang operasional perangkat daerah tidak layak	Penyelenggaraan operasional dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah terganggu	BPKAD, Stake Holder, dan Masyarakat

OPD tidak tertib dalam menyampaikan dokumen RKBMD	3	3	9	Ada	fasilitasi dan pendampingan penyusunan RKBMD secara terjadwal dan berkala sesuai dengan	Memadai	2	2	4
Target Retribusi AHD tidak terpenuhi	3	4	12	Ada	arahan dan rekomendasi Kepala BPKAD terkait layanan AHD	Memadai	2	3	6
kelangkaan barang yang dibutuhkan	2	4	8	Ada	koordinasi dengan Kemenag terkait jadwal pelaksanaan Ibadah Haji	Memadai	1	4	4
Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	3	4	12	Ada	Melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan operasional kantor	Memadai	2	4	8
penyedia jasa kebersihan tidak menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam kontrak	5	2	10	Ada	surat peringatan kepada pihak ketiga penyedia jasa	Memadai	4	2	8
peralatan dan mesin tidak dapat digunakan	3	4	12	Ada	melakukan kegiatan inventarisasi peralatan dan mesin secara berkala	Belum Memadai	3	4	12
komplain dari pengguna layanan	3	4	12	Ada	melakukan kegiatan inventarisasi gedung dan bangunan secara berkala	Belum Memadai	3	4	12
dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan	2	5	10	Ada	Melakukan penyesuaian dengan perubahan regulasi yang berlaku	Memadai	1	5	5
SDM tidak memahami regulasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	2	5	10	Ada	melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber terkait	Memadai	1	5	5
pembaharuan data dan informasi tidak dilaksanakan secara cepat dan tepat	3	4	12	Ada	melakukan pengawasan, koordinasi, dan rekonsiliasi data	Memadai	1	4	4
Terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	2	3	6	Ada	Melakukan sosialisasi untuk pembaruan data Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran	Memadai	1	3	3
Pegawai tidak mematuhi kode etik pegawai / melanggar peraturan kepegawaian	3	3	9	Ada	1. Pembinaan, pengarahan pimpinan kepada pegawai; dan 2. Pelaksanaan pengendalian intern pegawai	Memadai	2	3	6
Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan pangkat/golongan dan/atau pensiun	2	2	4	Ada	Menetapkan SOP layanan administrasi kepegawaian	Memadai	1	2	2
Perangkat daerah terlambat menerima informasi-informasi yang dibutuhkan	3	3	9	Ada	Efisiensi dan efektifitas penggunaan sarana administrasi umum	Memadai	2	3	6
Barang yang dibutuhkan tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal yang disyaratkan	3	2	6	Ada	Sosialisasi/diseminasi kebijakan pengaaan barang/jasa pemerintah terkait Produk Dalam Negeri	Memadai	2	2	4
Gratifikasi dalam proses pengadaan oleh pelaku pengadaan	3	4	12	Ada	Penerapan kode etik pegawai dan peningkatan pengendalian intern	Memadai	2	4	8
Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	2	4	8	Ada	Efisiensi dan efektifitas penggunaan operasional kantor	Memadai	1	4	4
Pegawai tidak merasa nyaman bekerja di kantor	3	3	9	Ada	Menyusun perencanaan pemeliharaan sarana prasarana sesuai skala prioritas	Memadai	2	3	6

OPD tidak tertib dalam menyampaikan dokumen RKBMD	4	Kepala BPKAD	Kurangnya koordinasi antara Bagian Program dan Pengurus Barang	Keterlambatan penyampaian RKBMD
Target Retribusi AHD tidak terpenuhi	6	Kepala BPKAD	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan AHD yang rendah	Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Provinsi Jawa Tengah tidak dapat
kelangkaan barang yang dibutuhkan	4	Kepala BPKAD	masa pelaksaaan pengadaan barang terlalu singkat	kebutuhan jumlah barang tidak terpenuhi
Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	8	Kepala BPKAD	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa	Operasional kantor terhambat dan atau berhenti
penyedia jasa kebersihan tidak menjalankan tugas sebagaimana	8	Kanit AHD	1) personel kebersihan tidak optimal dalam menjalankan pekerjaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa AHD yang
peralatan dan mesin tidak dapat digunakan	12	Kepala BPKAD	1) Terbatasnya kegiatan pemeliharaan peralatan mesin 2) Terbatasnya kegiatan	Tidak optimalnya pelayanan yang diberikan
komplain dari pengguna layanan	12	Kepala BPKAD	Terbatasnya kegiatan pemeliharaan gedung bangunan	penurunan pendapatan retribusi AHD
dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai	5	Kepala BPKAD	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah
SDM tidak memahami regulasi penyusunan dokumen perencanaan	5	Kepala BPKAD	Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai dengan	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai
Pembayaran Gaji dan Tunjangan tidak terbayar	4	Kepala BPKAD	1. Perhitungan Kebutuhan tidak tepat 2. Belum melakukan antisipasi atas	Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan
Terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan	3	Kepala BPKAD	Tidak akuratnya Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran	1. Pengembalian atas kelebihan gaji dan tunjangan 2. Pembuatan
Pegawai tidak mematuhi kode etik pegawai / melanggar peraturan kepegawaian	6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah
Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan pangkat/golongan dan/atau pensiun	2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Personil kepegawaian tidak optimal dalam menjalankan tugasnya	Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan terkait
Perangkat daerah terlambat menerima informasi-informasi yang	6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhambat
Barang yang dibutuhkan tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Personil pengadaan belum menguasai kebijakan pengadaan	Tidak tercapainya target realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) perangkat
Gratifikasi dalam proses pengadaan oleh pelaku pengadaan	8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Keinginan memperoleh keuntungan pribadi	Kualitas barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan
Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa	Penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat
Pegawai tidak merasa nyaman bekerja di kantor	6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarana prasarana penunjang operasional perangkat daerah tidak	Penyelenggaraan operasional dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan	OPD tidak tertib dalam menyampaikan dokumen RKBMD	4	Kurangnya koordinasi antara Bagian Program dan Pengurus Barang	Keterlambatan penyampaian RKBMD			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Target Retribusi AHD tidak terpenuhi	6	Tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan AHD yang rendah	Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Provinsi Jawa Tengah tidak dapat memenuhi target			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kelangkaan barang yang dibutuhkan	4	masa pelaksaaan pengadaan barang terlalu singkat	kebutuhan jumlah barang tidak terpenuhi			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	8	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa langganan	Operasional kantor terhambat dan atau berhenti			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	penyedia jasa kebersihan tidak menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam kontrak	8	1) personel kebersihan tidak optimal dalam menjalankan pekerjaan 2) pengawasan atas pekerjaan personel kebersihan tidak optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan jasa AHD yang semakin menurun			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	peralatan dan mesin tidak dapat digunakan	12	1) Terbatasnya kegiatan pemeliharaan peralatan mesin 2) Terbatasnya kegiatan peremajaan peralatan mesin	Tidak optimalnya pelayanan yang diberikan	pengajuan nota dinas kebutuhan pemeliharaan dan/atau peremajaan peralatan dan mesin	Kanit AHD	2025
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	komplain dari pengguna layanan	12	Terbatasnya kegiatan pemeliharaan gedung bangunan	penurunan pendapatan retribusi AHD	pengajuan nota dinas kebutuhan pemeliharaan gedung dan bangunan	Kanit AHD	2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan	5	Dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan	SDM tidak memahami regulasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	5	Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai dengan dinamika Regulasi Pemerintah Pusat dan Provinsi	dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah tidak sesuai peraturan perundangan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan tidak terbayar	4	1. Perhitungan Kebutuhan tidak tepat 2. Belum melakukan antisipasi atas kebutuhan tambahan (formasi baru yang akan terisi)	Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	3	Tidak akuratnya Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pegawai	1. Pengembalian atas kelebihan gaji dan tunjangan 2. Pembuatan susulan gaji dan tunjangan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pegawai tidak mematuhi kode etik pegawai / melanggar peraturan kepegawaian	6	Tanggung jawab dan moral pegawai rendah	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Perangkat Daerah rendah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar	Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan pangkat/golongan dan/atau pensiun	2	Personil kepegawaian tidak optimal dalam menjalankan tugasnya	Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan terkait kepegawaian tidak akurat	Pembentukan tim/pejabat pengadaan dan penandatanganan Pakta Integritas	Kepala BPKAD	2025
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Perangkat daerah terlambat menerima informasi-informasi yang dibutuhkan	6	Terbatasnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhambat			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Barang yang dibutuhkan tidak memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal yang disyaratkan	4	Personil pengadaan belum menguasai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Tidak tercapainya target realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) perangkat daerah			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Gratifikasi dalam proses pengadaan oleh pelaku pengadaan	8	Keinginan memperoleh keuntungan pribadi	Kualitas barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pelaksanaan operasional kantor tidak berjalan	4	1. Kurangnya pembayaran atas tagihan langganan 2. Perubahan tarif atas jasa langganan	Penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah terganggu			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	Pegawai tidak merasa nyaman bekerja di kantor	6	Sarana prasarana penunjang operasional perangkat daerah tidak layak	Penyelenggaraan operasional dan pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah terganggu			